



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

BUMD Cari Sumber Dana Lain

Pinjaman Bank Jadi Alternatif untuk Biayai Penugasan Menjaga Stabilisasi Harga

JAKARTA, KOMPAS — BUMD bidang pangan di DKI Jakarta harus mencari cara untuk membiayai penugasan menjaga stok pangan di Jakarta setelah pencabutan penyertaan modal pemerintah di rancangan APBD 2018. Dua tahun terakhir, BUMD ini menjaga kestabilan harga terutama di hari raya.

Pencabutan penyertaan modal pemerintah (PMP) diputuskan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, Selasa (14/11). Keputusan itu dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018.

RAPBD ini diserahkan Pemprov DKI Jakarta ke DPRD, Rabu. Dokumen RAPBD siap dibahas dalam Banggar DPRD DKI sebelum disahkan sebagai APBD DKI Jakarta 2018.

Direktur Utama PT Food Station Tjpinang Arief Prasetyo Adi, Rabu (15/11), mendukung penuh semua kebijakan dan keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Keputusan (menghapuskan PMP) itu sudah pasti beliau pikirkan dengan sangat baik dan matang," ujarnya.

Food Station mengajukan PMP senilai Rp 125 miliar. Dana ini dicoret dan tidak dimasukkan dalam RAPBD 2018.

BUMD ini bertugas menjaga stok dan harga pangan, khususnya beras. Arief memastikan, upaya stabilisasi harga beras dilakukan sejak Oktober 2017 dan direncanakan berlangsung hingga Maret 2018. Operasi pasar juga terus dilakukan dengan menggunakan beras cadangan pemerintah yang disimpan oleh Perum Bulog. Food Station memiliki cadangan 200.000 ton beras di gudang Perum Bulog untuk operasi pasar dan stok pangan.

Untuk penugasan dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu memasok beras bersubsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan warga rusunawa pada 2018, kemungkinan besar Food Station mesti mencari sumber dana lain,

di antaranya bekerja sama dengan Bank DKI. "Plafon kami di Bank DKI masih sebesar Rp 100 miliar," ujar Arief.

Rencana mencari sumber pendanaan lain guna melaksanakan penugasan juga akan dilakukan PD Dharma Jaya. BUMD pangan ini ditugasi menjaga stok dan harga daging sapi. Dharma Jaya mengusulkan PMP Rp 39 miliar. Sama seperti Food Station, usulan PMP itu dicoret.

Padahal, dalam rapat Komisi C DPRD, Senin (13/11) malam, pembahasan mengenai PMP begitu intensif dan tidak ada tanda-tanda PMP akan dihapus.

Beban bunga

Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma Jati mengatakan, untuk penugasan ketahanan pangan, seharusnya BUMD mendapat dukungan dari Pemprov DKI.

Menghadapi ketiadaan PMP itu, Dharma Jaya akan mengoptimalkan aset seperti yang sudah dilakukan selama ini, yakni penyewaan kandang, *cold storage*, dan rumah potong hewan.

Dharma Jaya juga akan bekerja sama dengan Bank DKI untuk mendapatkan sumber pendanaan. Namun, cara tersebut dinilai aneh karena PD Dharma Jaya harus membayar bunga atas pinjaman di bank demi melakukan penugasan dari pemerintah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, setelah berkomunikasi dengan direktur utama BUMD PT Food Station dan PD Dharma Jaya, diketahui bahwa PMP digunakan untuk pengerjaan infrastruktur, bukan kebutuhan pengendalian harga pangan.

Karena RAPBD 2018 defisit, ia menantang para dirut BUMD untuk mencari pembiayaan dana secara mandiri. "Terjadi defisit anggaran karena kami ingin membela yang belum dibela pemimpin Ibu Kota ini (sebelumnya). Saya meminta mereka (dirut BUMD) tetap bertahan dan tugas pokok dan fungsi tidak terganggu. Dan, mereka semua menyatakan justru tidak terbebani karena bisa mencari pembiayaan sendiri," ujar Sandiaga.

Ia tidak meragukan kemampuan para dirut BUMD pangan. Ia optimistis, para dirut BUMD bisa berinovasi menghasilkan solusi saat PMP dicoret. Ia juga mengatakan akan membantu BUMD untuk mencari pendanaan demi menjaga ketahanan dan stabilitas harga pangan di Jakarta.

Sebelumnya, inflasi Jakarta selama masa puasa dan Lebaran 2017 hanya 0,46 persen. Angka inflasi itu terendah dibandingkan dengan masa Lebaran enam tahun terakhir. Inflasi dapat dikendalikan karena harga bahan makanan tidak naik tinggi.

Kepala Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Thoman Pardosi mengatakan, rendahnya angka inflasi menunjukkan keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta terutama dalam menjaga kestabilan harga bahan pangan (*Kompas*, 4 Juli 2017).

Fungsi kontrol

Bestari Baru, anggota Banggar DPRD DKI, menyesalkan penghapusan PMP terhadap BUMD pangan itu. Untuk pangan, ada saat-saat gejolak harga dan stok terjadi. Saat itu, pemerintah melalui BUMD seharusnya bisa hadir menjaga.

"Alokasi penambahan modal pada BUMD itu tujuannya untuk memperkuat dan mengantisipasi upaya tengkulak untuk mempermainkan harga dan mengeruk keuntungan besar di saat seperti puasa dan Lebaran. Adanya BUMD itu, kan, kepanjangan tangan pemerintah untuk me-

lakukan kontrol," ujar Bestari.

Bestari melanjutkan, RAPBD masih mungkin diubah. Namun, untuk nomenklatur sudah dikunci, tidak bisa diubah.

Ida Mahmudah, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, juga menyayangkan PMP PT Food Station dihapuskan karena saat ini BUMD itu, masih membutuhkan dana untuk menjaga stabilitas pangan.

Menurut dia, dalam pembahasan KUA-PPAS 2018, sejumlah anggota Komisi B memang mengusulkan pencoretan dana PMP ke PT Food Station dan PD Dharma Jaya. Namun, Fraksi PDI-P tidak setuju pencoretan itu. Ia tidak tahu proses akhirnya seperti apa karena tidak masuk dalam Banggar.

Subsidi pangan

Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, meskipun PMP untuk BUMD pangan dihapuskan, TPID tetap berkomitmen menjaga stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Ia juga akan berkomunikasi dengan BUMD pangan untuk mengevaluasi apakah kemampuan dana mereka memadai untuk melaksanakan tugas stabilisasi harga tersebut.

"Coba nanti kami perdalam lagi rapat dengan BUMD pangan. Yang jelas, komitmen terhadap stabilisasi harga pangan DKI masih kami jaga," ujar Sri.

Menurut Sri, masyarakat Jakarta tak perlu khawatir dengan harga pangan, terutama saat hari raya, karena program subsidi pangan masih tetap berjalan.

Di RAPBD 2018, penerima subsidi pangan akan ditambah, tidak hanya untuk penghuni rumah susun dan penerima KJP, tetapi juga lansia, buruh berpenghasilan setara upah minimum provinsi (UMP), dan penyandang disabilitas. Subsidi tidak hanya diberikan untuk produk beras, daging ayam, dan daging sapi, tetapi juga akan ditambah untuk ikan dan susu.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

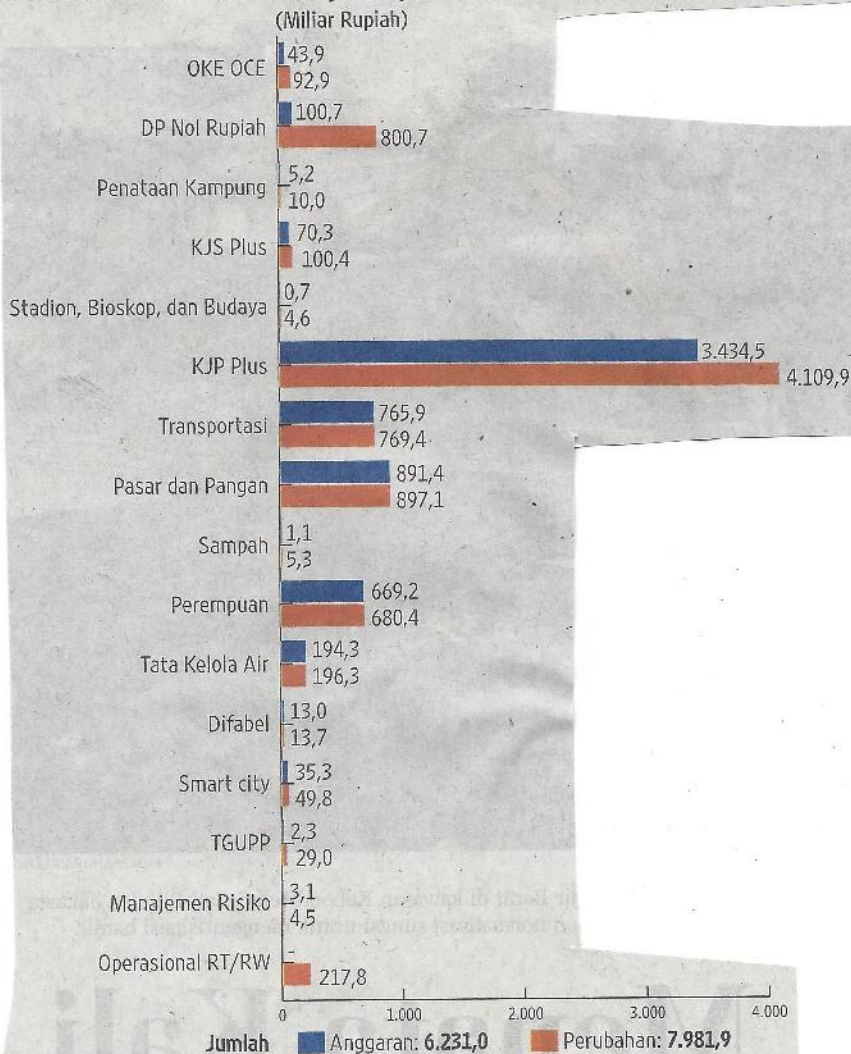
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

BUMD Cari Sumber Dana Lain

"Pola subsidi seperti itu sudah ada di pos anggaran dinas kelautan, pertanian, dan ketahanan pangan," ujarnya. (HT.N/DEA)

HASIL SINKRONISASI VISI, MISI, DAN JANJI GUBERNUR DKI JAKARTA



Sumber: HLN/DEA/Litbaan "Kompas"/FBN, dikolah dari Pemprov DKI Jakarta

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

BUMD Cari Sumber Dana Lain

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rancangan KUPA-PPAS APBD 2018

BUMD	Penyertaan Modal Pemerintah (Miliar Rupiah)		Bar Chart
	Usulan	Pembahasan	
PT MRT Jakarta	3.906,0	3.682,0	[Redacted]
PT Jakarta Propertindo	3.361,0	2.232,0	[Redacted]
PD Pembangunan Sarana Jaya	394,4	-	[Redacted]
PD Dharma Jaya	39	-	[Redacted]
PD PAL Jaya	-	-	[Redacted]
PT Food Station Tjipinang	125,0	-	[Redacted]
PT Bank DKI Jakarta	-	-	[Redacted]
PT Jakarta Tourisindo	23,6	-	[Redacted]
PT Penjaminan Kredit Daerah	100,0	-	[Redacted]
PT Asuransi Bangun Askrida	4,4	-	[Redacted]



Fokus Program Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022

- Membuka lapangan kerja dan kewirausahaan baru melalui program OK-OCE
- Meningkatkan akses pendidikan, antara lain melalui pelayanan KJP Plus
- Meningkatkan derajat kesehatan antara lain melalui pemenuhan "universal coverage"
- Melaksanakan penataan kawasan secara terpadu
- Menyediakan hunian yang layak dan terjangkau melalui program DP 0 Rupiah
- Menyediakan layanan transportasi terpadu melalui program OK-TRIP
- Pemuliaan perempuan dan perlindungan anak
- Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, modern, dan melayani



INFOGRAFIK: GUNAWAN